**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR**

1. **Tinjauan Pustaka**
2. **Konsep Pemberdayaan**
3. **Pengertian Pemberdayaan**

Pemberdayaan berasal dari kata “daya” yang mendapat awalan ber yang menjadi kata “berdaya” artinya memiliki atau mempunyai daya. Daya artinya kekuatan, berdaya artinya memiliki kekuatan. Pemberdayaan artinya membuat sesuatu menjadi berdaya atau mempunyai daya atau kekuatan.

Konsep pemberdayaan (*empowering)* dalam pendidikan luar sekolah di Indonesia pertama kali dikembangkan oleh Kindervatter (Anwar. 2007: 77) Ia memandang bahwa :

Pemberdayaan sebagai proses pemberian kekuatan atau daya dalam bentuk pendidikan bertujuan membangkitkan kesadaran, pengertian, dan kepekaan warga belajar terhadap perkembangan sosial, ekonomi dan politik, sehingga pada akhirnya ia memiliki kemampuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kedudukannya dalam masyarakat.

Menurut Slamet (Anwas. 2013: 49) hakikat pemberdayaan adalah "membuat masyarakat mampu membangun dirinya dan memperbaiki kehidupannya sendiri”.

Istilah mampu dalam definisi tersebut mengandung makna: berdaya, paham, termotivasi, memiliki kesempatan, melihat dan memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerja sama, tahu alternatif, mampu mengambil keputusan, berani mengambil resiko, mampu mencari dan menangkap informasi serta mampu bertindak sesuai inisiatif.

Pada pelaksanaannya, pemberdayaan memiliki makna dorongan atau memotivasi, bimbingan, pendampingan dalam meningkatkan kemampuan individu atau masyarakat untuk mampu mandiri. Upaya tersebut merupakan sebuah tahapan dari proses pemberdayaan dalam mengubah perilaku, mengubah kebiasaan lama menuju perilaku baru yang lebih baik, dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan.

Menurut Persons (Anwas. 2013: 49) pemberdayaan adalah:

Menyiapkan kepada masyarakat berupa sumber daya, kesempatan, pengetahuan dan menentukan masa depan mereka serta berpartisipasi dan mempengaruhi kehidupan dalam komunitas masyarakat itu sendiri.

Menurut Ife (Suharto. 2010: 59) bahwa “Pemberdayaan memuat dua pengertian kunci, yakni kekuasaan dan kelompok lemah”. Kekuasaan di sini diartikan bukan hanya menyangkut kekuasaan politik dalam arti sempit melaikan kekuasaan atau penguasaan klien atas:

1. Pilihan-pilihan personal dan kesempatan hidup: kemampuan dalam membuat keputusan mengenai gaya hidup, tempat tinggal dan pekerjaan.
2. Pendefenisian kebutuhan: kemampuan menentukan kebutuhan selaras dengan aspirasi dan keinginannya.
3. Ide atau gagasan: kemampuan mengekspresikan dan menyambungkan gagasan dalam suatu forum atau diskusi secara bebas dan tanpa tekanan.
4. Sumber-sumber: kemampuan memobilitas sumber-sumber formal, informal dan kemasyarakatan.
5. Aktivitas ekonomi: kemampuan memanfaatkan dan mengelola mekanisme produksi, distribusi dan pertukaran barang serta jasa.
6. Reproduksi: kemampuan dalam kaitanya dengan proses kelahiran, perawatan anak, pendidikan dan sosialisasi.

Berdasarkan uraian sebelumnya, pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan merujuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial; yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegitan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas kehidupanya.

Menurut Shardlow (Riza. 2006: 47) bahwa “pemberdayaan membahas tentang bagaimana individu, kelompok berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan membentuk masa depan sesuai dengan keinginan mereka”.

Naraya (Agus. 2009: 25) mengungkapkan bahwa dalam meningkatkan pemberdayaan suatu komunitas didukung oleh beberapa elemen berikut:

1. Akses informasi

Informasi merupakan salah satu sarana bagi masyarakat untuk memperoleh akses terhadap kekuasaan dan kesempatan. Kekuasaan di sini tidak didefenisikan begitu saja, melainkan pengertian kekuasaan ini merupakan kemampuan masyarakat terutama masyarakat miskin untuk memperoleh akses dan kesempatan pemperjuangkan hak-hak dasarnya.

1. Inklusi dan partisipasi

Inklusi merupakan pengurangan hambatan intensif untuk meningkatkan askes bagi individu dan kelompok yang beragam untuk memiliki kesempatan dan pengembagan.

1. Akuntabilitas

Akuntabilitas merujuk pada kemampuan pemerintah, perusahaan swasta penyediaan pelayanan untuk dapat mempertanggujawabkan kebijakan, tindakan serta penggunaan data yang mendukung pelaksanaan tersebut.

1. Kapasitas organisasi lokal

Kapasitas organisasi lokal merujuk pada kemapuan masyarakat untuk bekerja sama dan mengorganisasikan diri mereka dan memobilitas sumber daya untuk memecahkan masalah.

Kesimpulan uraian di atas bahwa dalam menigkatkan keberdayaan suatu komunitas dapat didukung oleh akses informasi, inklusi, akuntabilitas dan kapasitas organisasi lokal yang dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat sehingga mempunyai kamampuan untuk bekerja dalam memecahkan masalah.

Suharto (Anwas. 2013: 50) menjelaskan bahwa indikator pemberdayaan paling tidak memiliki empat hal, yaitu :

Kegiatan yang terencana dan kolektif, memperbaiki kehidupan masyarakat, prioritas bagi kelompok yang lemah atau kurang beruntung, serta dilakukan melalui program peningkatan kapasitas

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan merupakan upaya berencana yang dirancang untuk melakukan perubahan dari kondisi tidak berdaya menjadi berdaya dengan menyiapkan kesempatan pengetahuan untuk meningkatkan kapasitas diri dalam menentukan masa depan.

1. **Pemberdayaan Penyandang Tunanetra**

Seperti yang telah dipahami pemberdayaan adalah pada intinya membahas bangaimana individu kelompok maupun komunitas berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk membentuk masa depan sesuai dengan keinginan mereka.

Pemberdayaan yang sesuai bagi tunanetra adalah pemberdayaan yang memperhatikan kemampuan, karakteristik, dan kebutuhan dari ketunaan/ gangguan tiap-tiap tunanetra yang bertujuan untuk mengembangkan potensi kemanusiaan mereka secara sempurna dan dapat berkembang secara optimal.

Hidayat (2013:28) menjelaskan bahwa,

Tunanetra karena keterbatasan pada penglihatannya mereka memerlukan layanan khusus hampir dalam setiap gerak kehidupannya terutama hal-hal yang bersifat visual, begitupun dalam layanan pemberdayaan, mereka memerlukan layanan khusus atau layanan termodifikasi

Selanjutnya Nawawi (Hidayat, 2010:29) menjelaskan bahwa strategi dan pendekatan pembelajaran bagi tunanetra harus mengandung:

1. Layanan individual, yaitu tutor dituntut memperhatikan adanya perbedaan-perbedaan individu
2. Azas kekongritan, yaitu tutor harus memungkinkan tunanetra mendapatkan pengalaman secara nyata dari apa yang dipelajarinya
3. Azas kesatuan. Yaitu tutor harus memungkinkan tunanetra untuk memperoleh pengalaman objek maupun situasi secara utuh dapat terjadi apabila tutor mendorong warga belajarnya untuk melibatkan semua pengalaman penginderaanya secara terpadu dalam memahami sebuah konsep.
4. Aktivitas mandiri, yaitu tutor memungkinkan mendorong tunanetra belajar secara aktif dan mandiri
5. Media pembelajaran, media pembelajaran yang digunakan adalah media yang khusus juga agar mereka mendapatkan ilmu pengetahuan dan mencapai cita-citanya seperti anak normal lainnya.

Dari uraian di atas dapat dipahami dan ditarik kesimpulan bahwa pemberdayaan bagi penyandang tunanetra haruslah memerlukan layanan khusus dan layanan yang termodifikasi, karena penyandang tunanetra bukanlah masyarakat yang normal yang mampu menerima layanan pemberdayaan secara normal.

1. **Pengertian Penyandang Tunanetra**

Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005:179) menegaskan bahwa Tunanetra adalah “seseorang yang tidak dapat melihat jarinya sendiri dalam jarak 1 meter”.

Selanjutnya menurut Pradopo (1996:12),

Tunanetra adalah seseorang yang memiliki hambatan dalam penglihatan/tidak berfungsinya indera penglihatan dan memiliki cirri-ciri yaitu (1) Tidak dapat melihat gerakan tangan pada jarak kurang dari 1 (satu) meter, (2) Ketajaman penglihatan 20/200 kaki yaitu ketajaman yang mampu melihat suatu benda pada jarak 20 kaki dan (3) Bidang penglihatannya tidak lebih luas dari 20º

Sejalan dengan definisi-definisi di atas Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (1984:13) dalam buku petunjuk penyelenggaraan SLB menyebutkan bahwa,

Tunanetra secara umum diartikan adalah anak yang tidak dapat melihat/buta atau tidak cukup jelas penglihatannya, sehingga walaupun telah dibantu dengan kacamata ia tidak dapat mengikuti pendidikan dengan menggunakan fasiilitas yang umum dipakai oleh anak awas.

Berdasarkan definisi-definisi di atas dapat dipahami bahwa tunanetra adalah orang yang tidak berfungsi penglihatannya walaupun telah dibantu fasilitas apapun sehingga mereka menggunakan fasilitas yang lebih khusus dari orang awas.

Selanjutnya pendapat lain dikemukakan oleh Geraldine (Hidayat, 2013) dalam pengantar Pendidikan Luar Biasa bahwa “orang yang memiliki kebutaan apabila ketajaman penglihatan sentralnya 20/200 *feet* atau kurang pada penglihatan terbaiknya setelah dikoreksi lebih dari 20/200 feet, tetapi ada kerusakan pada lantang pandangnya”.

Ketunanetraan pada umumnya sama sekali tidak memiliki pengalaman visual, sehingga bagi mereka informasi yang didengarnya menjadi tidak berarti bila tidak dihubungkan pengalaman lainnya yang sudah pernah mereka ketahui atau informasi itu tidak dideskripsikan dengan jelas atau dirabakan.

Dari pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa tunanetra bukan semata yang tidak mampu melihat/buta, tetapi juga mereka yang terbatas penglihatannya sedemikian rupa, sehingga walaupun telah dibantu dengan kacamata, mereka tetap tidak mampu mengikuti pendidikan dengan menggunakan fasilitasn yang umum di pakai oleh anak awas.

1. **Klasifikasi Tunanetra**

Soedjadi (1987:33) menjelaskan secara garis besar tunanetra dapat di bagi dalam 2 yaitu “(1) Waktu terjadinya kecacatan dan (2) Kemampuan daya lihat”. Selanjutnya dijabarkankan sebagai berikut:

1. Waktu terjadinya kecacatan yaitu sejak kapan anak menderita tunanetra, sejak lahir, sejak bayi, semasa usia sekolah , sesudah dewasa atau sesudah lanju. Hal ini perlu diketahui agar dapat memberikan pendidikan bagi penderita tunanetra
2. Kemampuan daya lihat yakni penderita tunanetra ringan (mereka yang mempunyai kelainan atau kekurangan daya penglihatan , seperti penderita rabun) penderita tunanetra setengah berat (mereka yang kehilanagn sebagian daya penglihatan) penderita tunanetra berat (mereka yang sama sekali tidak dapat melihat).

Selanjutnya Soekini (1977) mengklasifikasi tunanetra secara garis besar dibagi empat yaitu (1) Berdasarkan waktu, (2) Berdasarkan kemampuan daya penglihatan, (3) Berdasarkan pemeriksaan klinis dan (4) Berdasarkan kelainan-kelainan pada mata.

Selanjutnya dijabarkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan waktu terjadinya ketunanetraan:
2. Tunanetra sebelum dan sejak lahir
3. Tunanetra setelah lahir atau pada usia kecil
4. Tunanetra pada usia sekolah atau pada masa remaja
5. Tunanetra pada usia dewasa
6. Tunanetra dalam usia lanjut
7. Berdasarkan kemampuan daya penglihatan:
8. Tunanetra ringan (*defective vision/low vision*)
9. Tunanetra setengah berat (*partially sighted*)
10. Tunanetra berat (*totally blind*)
11. Berdasarkan pemeriksaan klinis:
12. Berdasarkan kelainan-kelainan pada mata:
13. Myopia
14. Hyperopia
15. Astigmatisme
16. **Pola Pembelajaran bagi Tunanetra**

Hidayat (2013: 35) menjelaskan pola pembelajaran bagi tunanetra yaitu “(1) duplikasi, (2) modifikasi, (3) substitusi dan (4) omisi”. Selanjutnya dijabarkan sebagai berikut:

1. Duplikasi, mengandung arti mengambil seluruh materi dan strategi pembelajaran pada anak awas ke dalam pembelajaran pada anak tunanetra tanpa melakukan perubahan, penambahan, dan pengurangan apa pun.
2. Modifikasi, yaitu sebagian atau keseluruhan materi, media, prosedur, dan strategi pembelajaran yang digunakan pada pembelajaran orang awas dimodifikasi sedemikian rupa sehingga materi, media, dan strategi pembelajarannya sesuai dengan karakteristik anak.
3. Substitusi, yaitu mengganti materi, media dan strategi pembelajaran yang berlaku bagi anak/orang awas, bahkan mengganti materi/pelajaran tertentu.
4. Omisi, yaitu penghilangan materi tertentu yang berlaku pada pembelajaran anak/orang awas. Hal ini dilakukan apabila ketiga prinsip di atas sudah tidak dapat dilakukan

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa tunetra memerlukan pola pembelajaran yang berbeda dengan orang awas, dikarenakan mereka memiliki keterbatasan dalam melihat.

Bila seorang awas mampu menerima 90 % informasi untuk melaksanakan kegiatan menolong diri sendiri dalam hidup sehari-hari, tidak demikian halnya dengan seorang tunanetra. Misalnya seorang awas sedang mempergunakan bedak, dengan mudah ia dapat mengetahui tebal tipisnya bedak pada mukanya yaitu dengan melihat di depan cermin saja.

1. **Ciri-Ciri Khusus Tunanetra**

Menurut Anastasia (Satya, 2005:19) karakter atau ciri-ciri khusus tunanetra, diantaranya: “(1) Rasa rendah diri, (2) Curiga terhadap orang lain, (3) *Blindsm* dan (4) Keterbatasan konsep*”.*

Selanjutnya dijabarkan sebagai berikut:

1. Rasa rendah diri, Rasa rendah diri timbul pada tunanetra dikarenakan kecacatannya, pengalaman-pengalaman tunanetra yang serba terbatas.
2. Curiga terhadap orang lain, Akibat keterbatasan rangsangan visual atau kurang mampu berorientasi dengan lingkungannya sehingga kemampuan mobilitasnya terganggu..
3. *Blindsm, Blindsm* adalah gerak-gerik tunanetra yang bisa dilakukan banyak tunanetra seperti menggerakan badan kedepan dan kebelakang, ataupun kekanan kekiri, bertepuk-tepuk, menggeleng-gelengkan kepala, menggerak-gerakan tangan didepan mata, dan banyak lainnya.
4. Keterbatasan konsep, keterbatasan konsep pada tunanetra terjadi sebagai akibat tidak tahu atau kurang berfungsinya indera penglihatan. Kita ketahui bahwa proses pembentukan pendapat, konsep, dan sebagainya adalah proses yang cukup lama dan didapat melalui indera penglihatan.
5. **Pengertian Kecakapan Hidup *(Life skill)***

Menurut UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003, bahwa “pendidikan merupakan usaha sadar agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran dan/atau cara lain yang dikenal dan diakui oleh masyarakat”. Artinya bahwa manusia sepanjang hidupnya membutuhkan pendidikan dalam kehidupannya dan hal ini secara tidak langsung tercermin pada aspek kehidupan kita sehari - hari misalnya dalam berorganisasi maupun dalam pergaulan masyarakat (bermasyarakat). Karena disanalah sebenarnya diri kita mengaktualisasikan potensi diri melalui proses pembelajaran pada permasalahan yang timbul dalam masyarakat.

Taufik (2009: 45) menjelaskan bahwa,

Tantangan pendidikan nasional yang dihadapi oleh bangsa Indonesia dewasa ini adalah (1) Peningkatan pemerataan kesempatan pendidikan, (2) Peningkatan kualitas pendidikan, (3) Peningkatan efesiensi pendidikan, dan 4) Peningkatan relevansi pendidikan

Begitu pula tantangan di lingkungan Pendidikan Nonformal (PNF), dimana permasalahan – permasalahan yang terjadi semakin komplek saja. Hal ini disebabkan dunia Pendidikan Nonformal adalah dunia yang berhadapan langsung dengan masyarakat / peserta didik yang bermasalah, baik itu bermasalah dari segi ekonomi (kemiskinan), segi pendidikan (putus sekolah), segi sosial (pengangguran), segi sumber daya manusia (rendahnya ketrampilan yang dimiliki) dan lain sebagainya. Dengan kata lain, Pendidikan Nonformal menitik beratkan pada pemberdayaan masyarakat sampah atau masyarakat yang bermasalah secara kolektif.

Lebih dijelaskan pada pendidikan, khususnya Pendidikan Nonformal merupakan kata kunci yang tepat dalam mengurai benang kusut yang terjadi dalam masyarakat marjinal. Salah satu unsur dalam PNF adalah pendidikan kecakapan hidup *(life skill)*, dimana inti dari pendidikan *life skill* ini adalah pembelajaran pada peserta didik dengan mengutamakan aspek keterampilan yang dapat dipakai sebagai penunjang dan pegangan hidup bagi mereka. Artinya ada relevansi pendidikan dengan kehidupan nyata yang nantinya akan dijalani oleh peserta didik.

Hal-hal tersebut dapat dilihat pada Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) yaitu merupakan salah satu institusi dari Pendidikan Nonformal yang memiliki peran penting dan strategis sekali dalam upayanya memberdayakan masyarakat khususnya di bidang pendidikan yaitu melalui program – program pendidikan *life skill* seperti pertukangan kayu, otomotif, menjahit, bordir, sablon, elektro, komputer dan lain-lain. Sehingga tidak salah bila masalah kemiskinan dan kebodohan yang dihadapi masyarakat dapat dicarikan solusinya melalui program - program PNF yang ada dalam institusi Sanggar Kegiatan Belajar (SKB).

1. **Konsep Dasar Pendidikan Kecakapan Hidup (*Life Skill)***

Beberapa pengertian tentang *life skill* dari para ahli pendidikan berbeda – beda karena disesuaikan dengan kepentingan dari peserta didik, akan tetapi esensinya sama.

Brolin (1989) mendifinisikan bahwa “kecakapan hidup sebagai kontinum pengetahuan dan kemampuan yang diperlukan oleh seseorang untuk berfungsi independent dalam kehidupannya”.

Selanjutnya Malik (2002) mendefinisikan kecakapan hidup sebagai “kecakapan hidup untuk bekerja selain kecakapan untuk berorientasi ke jalur akademik”.

Selanjutnya Tim *Broad-Based Education* Depdiknas (2002) menafsirkan kecakapan hidup sebagai,

Kecakapan yang dimiliki seseorang untuk mau dan berani menghadapi problema hidup dan kehidupan secara wajar tanpa merasa tertekan, kemudian secara proaktif dan kreatif mencari serta menemukan solusi sehingga akhirnya mampu mengatasinya.

Dari definisi-definisi di atas dapat dipahami bahwa dalam konteks masyarakat yang bermasalah sosial besar ini maka pengertian-pengertian di atas merupakan konsep pemikiran yang perlu disosialisaikan pada masyarakat tersebut untuk memotivasi diri mereka dengan cara memberi bekal dasar dan latihan keterampilan yang disesuaikan dengan nilai-nilai kebutuhan hidup sehari – hari agar tidak selamanya mengalami keterpurukan dalam kehidupannya.

Selanjutnya Tim *Broad-Based Education* Depdiknas (2002) mengemukakan bahwa tujuan pendidikan kecakapan hidup adalah:

1. Mengaktualisasikan potensi peserta didik sehingga dapat digunakan untuk memecahkan problema yang dihadapi.
2. Memberikan kesempatan pada sekolah (formal / nonformal) untuk mengembangkan pembelajaran yang fleksibel, sesuai dengan prinsip pendidikan berbasis luas.
3. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lingkungan sekolah (formal/nonformal) dengan mendaur ulang limbah alam yang ada untuk dimanfaatkan sesuai dengan prinsip manajemen berbasis sekolah.

Dengan demikian secara umum dapat dikatakan bahwa tujuan utama pendidikan kecakapan hidup adalah menyiapkan peserta didik agar yang bersangkutan mampu, sanggup dan terampil menjaga kelangsungan hidup dan perkembangannya di masa datang. Esensi dari pendidikan kecakapan hidup adalah untuk meningkatkan relevansi pendidikan dengan nilai-nilai kehidupan nyata, baik secara representatif maupun progresif.

1. **Hakekat Kecakapan Hidup *(Life Skill*)**

Konsep *life skills* merupakan salah satu fokus analisis dalam pengembangan kurikulum pendidikan yang menekankan pada kecakapan hidup atau bekerja. Istilah hidup tidak semata-mata memiliki kemampuan tertentu saja, namun ia harus memiliki kemampuan dasar pendukungnya secara fungsional seperti membaca, menulis, menghitung, merumuskan, dan memecahkan masalah, mengelola sumber daya, bekerja dalam tim, terus belajar di tempat kerja dengan mempergunakan teknologi.

Anwar (2013: 20) menjelaskan,

Program pendidikan *life skills* adalah pendidikan yang dapat memberikan bekal keterampilan yang praktis, terpakai, terkait dengan kebutuhan pasar kerja, peluang usaha dan potensi ekonomi atau industri yang ada di masyarakat. *Life skills* ini memiliki cakupan yang luas, berinteraksi antara pengetahuan yang diyakini sebagai unsur penting untuk hidup lebih mandiri.

Selanjutnya depdiknas (2003) menyebutkan bahwa ciri-ciri pembelajaran *life skills* adalah:

1. Terjadi proses identifikasi kebutuhan belajar
2. Terjadi proses penyadaran untuk belajar bersama
3. Terjadi keselarasan kegiatan belajar untuk mengembangkan diri, belajar, usaha mandiri dan usaha bersama
4. Terjadi proses penguasan kecakapan personal, sosial, akademik, manajerial dan kewirausahaan
5. Terjadi proses pemberian pengalaman dalam melakukan pekerjaan denga benar, menghasilkan produk bermutu
6. Terjadi proses interaksi saling belajar dari ahli
7. Terjadi proses penilaian kompetensi
8. Terjadi pendampingan teknis untuk bekerja atau membentuk usaha bersama

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa  *life skills* mengacu pada berbagai ragam kemampuan yang diperlukan seseorang untuk menempuh kehidupan dengan sukses, bahagia dan secara bermartabat di masyarakat dan juga mengembangkan kemampuan komunikasi secara efektif dan memiliki kesiapan untuk terjun ke dunia kerja.

1. **Pemberdayaan Penyandang Tunanetra Melalui Kecakapan Hidup *(lifeskill)* di Sanggar Kegiatan Belajar Ujung Pandang Kota Makassar**

Pelaksanaan pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang tidak berdaya sehingga mampu untuk mempengaruhi kehidupannya agar menjadi lebih baik.

Mardikanto (2013: 109) menjelaskan “pemberdayaan adalah menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuasaan atau kemampaun dalam memenuhi kebutuhan dasarnya”.

Tujuan utama pemberdayaan adalah memperkuat kekuasaan masyarakat dalam hal ini ibu rumah tangga yang memiliki ketidakberdayaan , baik karena kondisi internal (misalnya persepsi mereka sendiri), maupun karena kondisi eksternal (misalnya ditindas oleh struktur sosial yang tidak adil).

Suharto (2010: 79) menjelaskan bahwa “dalam pelaksanaan pemberdayaan, maka akan ada tahap-tahap yang dilaksanakan karena setiap perencanaan sosial dibuat dengan mengikuti tahapan atau siklus tertentu. Tahapan tersebut biasanya berbeda-beda tergantung pada jenis perencanaan, tujuan perencanaan dan konteks perencanaan”.

Adapun pelaksanaan pemberdayaan penyandang tunanetra dibagi dalam beberapa tahap, yaitu:

* + 1. **Perencanaan**

Dalam melaksanakan kegiatan/program tentunya harus ada tahap persiapan/ perencanaan. Suharto (2010: 73), menjelaskan bahwa “perencanaan program sangat tergantung pada asumsi dan tujuan dari perencanaan sosial itu sendiri. Dalam tahap perencanaan terdapat dua bagian yaitu identifikasi masalah dan penentuan tujuan”. Selanjutnya diuraikan sebagai berikut:

* 1. Identifikasi masalah

Identifikasi masalah perlu dilakukan secara komprehensif menggunakan teknik-teknik dan indikator yang tepat. Suharto (2010:76) menyebutkan bahwa “identifikasi masalah sangat erat kaitannya dengan asesmen kebutuhan *(need assessment)*. Kebutuhan dapat didefinisikan sebagai kekurangan yang mendorong masyarakat untuk mengatasinya”.

Dari pernyataan Suharto tersebut di atas dapat dipahami bahwa asesmen kebutuhan dapat diartikan sebagai penentuan besarnya atau luasnya suatu kondisi dalam suatu populasi yang ingin diperbaiki atau penentuan berkurangnya dalam kondiri yang ingin direalisasikan.

* 1. Penentuan Tujuan

Suharto (2010: 77) menjelaskan bahwa:

Ada dua jenis atau tingkat tujuan, yaitu tujuan umum (*goal*) dan tujuan khusus (*objective*). Yaitu tujuan umum dirumuskan secara luas sehingga pencapaiannya tidak dapat diukur, sedangkan tujuan khusus merupakan pernyataan yang spesifik dan terukur mengenai jumlah yang menunjukkan kemajuan ke arah pencapaian tujuan umum.

Tujuan dapat didefinisikan sebagai kondisi di masa depan yang ingin dicapai. Maksud utama penentuan tujuan adalah untuk membimbing program ke arah pemecahan masalah. Tujuan dapat menjadi target yang menjadi dasar bagi pencapaian keberhasilan program.

* + 1. **Pelaksanaan**

Suharto (2012: 80) menjelaskan “pelaksanaan adalah proses dari langkah-langkah yang dilakukan dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat”. Langkah-langkah yang dilakukan dalam pelaksanaan merupakan implementasi dari aksi sosial yang prakteknya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat dalam penanganan masalah soial.

1. Pelaksanaan pemberdayaan

Pelaksanaan merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu badan atau wadah secara berencana, teratur dan terarah guna mencapai tujuan yang diharapkan. Pengertian Implementasi atau pelaksanaan menurut Westa (1985 : 17)

Implementasi atau pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan.

Implementasi adalah suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah tahap perencanan yang terdiri atas identifikasi masalah dan penentuan tujuan.

1. Faktor Pendukung dan Penghambat

Dalam pelaksanaan program tentunya akan ada faktor yang mendukung dan faktor yang menghambat. Keberhasilan dari terlaksananya suatu program tentunya membutuhkan banyak dukungan, bukan hanya pelaksana program, sasaran program tetapi juga lingkungan dari pelaksanaan program tersebut.

* + 1. **Evaluasi**

Dalam tahap evaluasi, analisis kembali kepada pemulaan proses perencanaan untuk menentukan apakah tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai. Suharto (2010: 119) menjelaskan bahwa evaluasi adalah “pengidentifikasian keberhasilan dan/atau kegagalan suatu rencana kegiatan atau program. Evaluasi lebih difokuskan pada pengidentifikasian kualitas program”.

Selanjutnya Mardianto (2013: 265) menjelaskan bahwa “evaluasi harus obyektif dalam artian harus dilaksanakan berdasarkan data atau fakta, dan menggunakan pedoman-pedoman tertentu”.

Evaluasi penting dilaksanakan guna mengetahui apakah program tersebut layak dilanjutkan atau dikembangkan atau juga diberhentikan. Evaluasi dalam pemberdayaan penyandang tuna netra ini mencoba menggali tentang hasil yang telah dicapai dan manfaat apa yang didapatkan dari sasaran pemberdayaan ini sendiri yaitu tuna netra.

1. **Kerangka Pikir**

Kegiatan pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakantugas-tugas kehidupannya.

Pengertian pemberdayaan sebagai tujuan seringkali digunakan sebagai indikator keberhasilan pemberdayaan sebuah proses.

Pemberdayaan penyandang tunanetra melalui kecakapan hidup ini pada hakekatnya di arahkan untuk mengembangkan potensi yang ada pada diri tunanetra, yang dimana pemberdayaan tersebut terdiri dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.

Berikut ini adalah skema kerangka pikir yang akan menjadi acuan dalam melakukan penelitian mengenai pemberdayaan penyandang tunanetra melalui kecakapan hidup di Sanggar Kegiatan Belajar Ujung Pandang Kota Makassar:

Penyandang Tunanetra

Creambath, pijat/refleksi, lulur dan medicure

Kegiatan Kecakapan Hidup (Life Skill)

Perencanaan

1. Identifikasi masalah
2. Penentuan Tujuan

Evaluasi

1. Hasil yang didapatkan
2. Manfaat yang dirasakan

Pelaksanaan

1. Pelaksanaan pemberdayaan
2. Faktor pendukung dan penghambat

Tunanetra yang terampil

**Gambar 1. Skema Kerangka Berpikir**